

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus diberikan perlindungan agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebagai generasi penerus anak menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Perlindungan terhadap anak pada suatu bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan pemerintah. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa atau pengaruh tertentu. Menurut M. Joni, dkk “Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum”. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.<sup>1</sup>

Seperti halnya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak.

Perilaku seks anak di bawah umur sangat labil, dikarenakan kurangnya

---

<sup>1</sup> M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 1

pengetahuannya terhadap seks itu sendiri dan hanya berpikiran untuk mencobanya saja. Berawal dari rasa penasaran dan ingin mencoba seks tersebut anak di bawah umur ingin mempraktekkan apa yang dilihatnya dalam situs porno di internet atau di media lainnya dan biasanya karena takut diketahui oleh orang tua maka anak di bawah umur yang telah terpengaruh oleh perilaku seks yang terlalu dini ini maka coba-coba melakukan terhadap teman-teman dekatnya atau bahkan teman adiknya yang berumur lebih muda dari dirinya.

Orang tua korban yang tidak terima kemudian melaporkan pelaku ke kepolisian. Ancaman hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku adalah cukup berat. Tindak pidana kesusilaan diatur dalam KUHP, khususnya pada: Pasal 281 yang mengatur tentang perbuatan yang merusak kesusilaan di depan umum; Pasal 282 merumuskan pornografi; Pasal 284 merumuskan delik zina; Pasal 285 merumuskan perbuatan perkosaan; Pasal 286-288 mengatur mengenai persetubuhan; Pasal 289-296 merumuskan perbuatan cabul.

Sistem peradilan pidana pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korban dan juga terhadap pelaku yang masih di bawah umur sehingga penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius.

Oleh karena itu sistem peradilan pidana anak harus dibedakan dengan pidana orang dewasa. Aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat

terlepas dari instrumen internasional (Konvensi Internasional) yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri. Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak memberikan landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak. Selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ditujukan sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang mendapat ancaman pidana demi mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus tetap diberikan hukuman. Menurut Marjono Rekstodiputro bahwa Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan atau keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana. Kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.<sup>2</sup>

Sistem peradilan pidana terdiri dari empat komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut bekerjasama dalam menegakkan keadilan. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana anak, masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Oleh karena itu untuk menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahateraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses

---

<sup>2</sup> Marjono Rekstodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, hal. 84

hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Misalnya dalam proses tahapan penyidikan, tidak hanya sekedar mencari bukti serta penyebab kejadian, tetapi juga diharapkan dapat mengetahui latar belakang kehidupan anak tersebut sebagai pertimbangan dalam menentukan tuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya pada proses penanganan perkara di pengadilan, perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimana pun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.<sup>3</sup>

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten karena tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak menunjukkan adanya peningkatan. Hasil studi pendahuluan di Polres Klaten, sepanjang tahun 2012, Polres Klaten

---

<sup>3</sup> Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan*, edisi ketiga, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hal. 68

mencatat ada 62 kasus yang melibatkan anak sehingga berhadapan dengan hukum (ABH). Sementara di tahun 2013 ini, sudah tercatat ada 67 kasus. Khusus untuk kasus asusila, meskipun didasari rasa saling suka, namun jika perbuatan mereka melanggar UUPA, maka tetap ditindak hukum lantaran dampaknya tidak hanya secara sosial dan kesehatan, tetapi juga pidana. Anak-anak yang terlibat dalam kasus ini juga awalnya tidak tahu jika ada hukuman pidana untuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Sementara itu, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Mutiara Klaten, yang bernaung di bawah Pemerintahan Kabupaten Klaten, menyatakan banyaknya jumlah kasus yang melibatkan anak bawah umur, merupakan fenomena gunung es yaitu sebenarnya yang dilaporkan itu lebih sedikit daripada yang tidak dilaporkan. Banyaknya jumlah kasus tersebut karena mulai banyaknya kesadaran masyarakat tentang hukum, sehingga kemudian melaporkannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Proses Peradilan Pidana di Kabupaten Klaten).”

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

---

<sup>4</sup> Jogja Tribun. Sabtu 13 Desember 2013. *Sepanjang-2013-di-klaten-terjadi-67-kasus-pidana-libatkan-anak*, dalam <http://jogja.tribunnews.com/2013/12/13/sepanjang-2013-di-klaten-terjadi-67-kasus-pidana-libatkan-anak>. Diunduh Senin 30 Maret 2015 pukul 14.30

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Untuk mendeskripsikan prosedur pelaksanaan peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis:

- 1) Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum pidana anak
- 2) Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak

b. Manfaat Praktis:

- 1) Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses peradilan terhadap anak



- 2) Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.
- 3) Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap anak.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Menurut Sudarto Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai dua hal pokok yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.<sup>5</sup>

Sementara menurut Lamintang Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara. Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>6</sup>

Selanjutnya Lamintang menyatakan “Pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat

---

<sup>5</sup> Sudarto. 1995. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang. Hal. 7

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintang. 2004. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung :Armico, Hal. 68

diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Penetapan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata". Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>7</sup>

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa:

"Tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Tujuan pemidanaan dalam undang-undang pemasyarakatan ini condong pada tujuan pemidanaan menurut teori gabungan tersebut di atas."

Tujuan pemidanaan tersebut harus dilaksanakan secara tuntas sehingga memberikan efek jera bagi pelakunya. Hal ini sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan ini sering sekali terdapat kasus mengenai tindak pidana kesusilaan yang meliputi tindakan perkosaan ataupun persetubuhan. Namun yang lebih memprihatinkan, tindak pidana kesusilaan sekarang bukan hanya lagi dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan juga kasus tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP

---

<sup>7</sup> Ibid. Hal. 69

dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP. Sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak di dalamnya diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tinjauan mengenai tindak pidana yang dilakukan anak. Menurut KUHPidana: anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata: Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Pengertian Anak Menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal I ayat (1): Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak harus mengacu pada Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. pidana peringatan;
  - b. pidana dengan syarat:
    - 1) pembinaan di luar lembaga;
    - 2) pelayanan masyarakat; atau
    - 3) pengawasan.
  - c. pelatihan kerja;
  - d. pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Pasal 27 menyatakan:

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

Selanjutnya pada tingkat penuntutan di kejaksaan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh jaksa untuk dapat menangani perkara pidana anak.

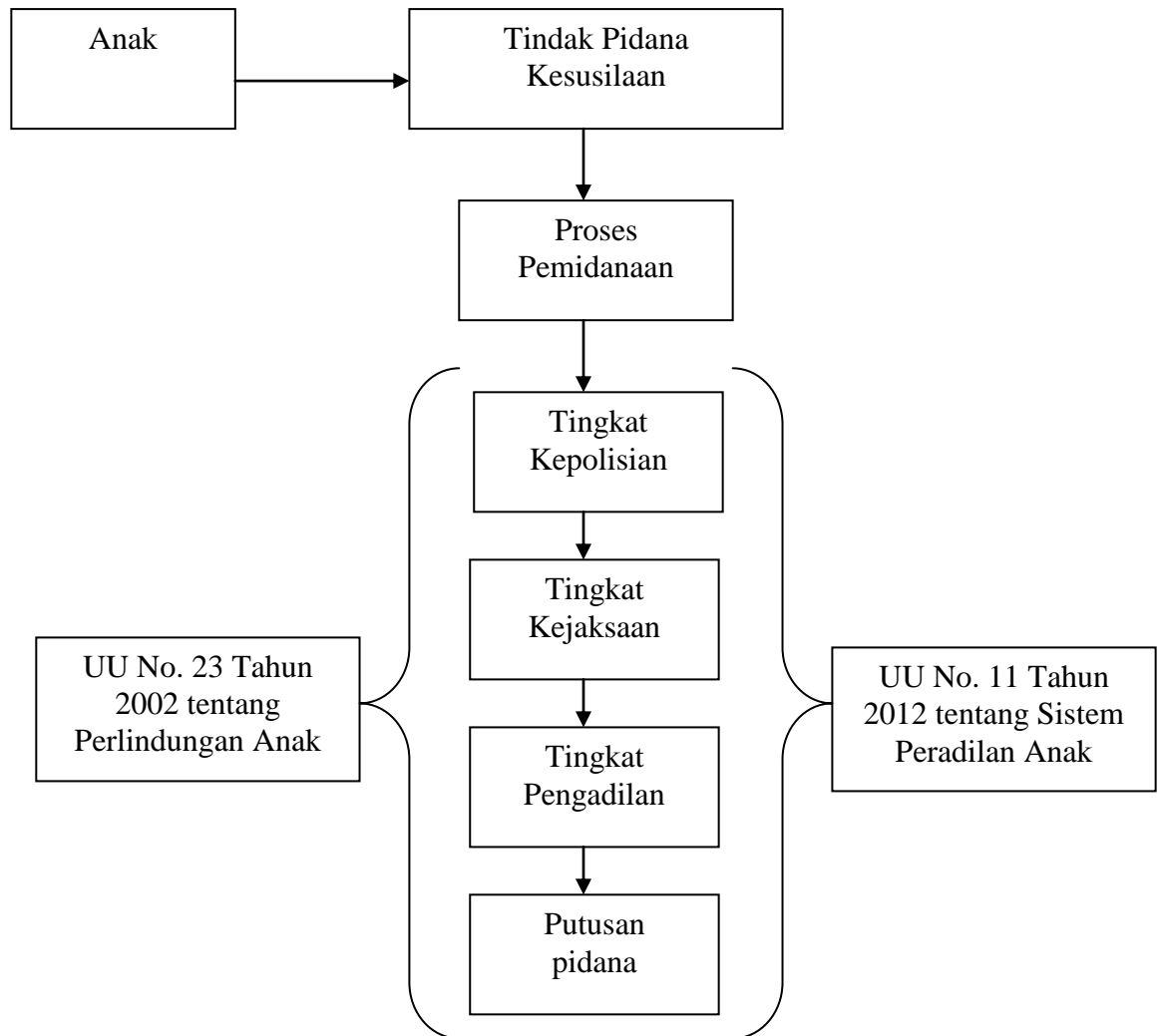
Pasal 41 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Ayat 2 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan:

- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
  - c. telah mengikuti pela

Selanjutnya pada tahap persidangan di pengadilan, Pasal 43 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan:

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
  - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1  
Kerangka Pemikiran

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto dapat dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan

penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut di atas, jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu jenis penelitian hukum empiris. Karena di sini peneliti meninjau pengertian dari sistem hukum dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris, karena mengacu pada efektivitas pelaksanaan hukum dan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Pendekatan yuridis empiris adalah yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kabupaten Klaten. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11, UI Pers, Jakarta. Hal. 74

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data yang diperoleh berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan penyidik di kepolisian, pihak kejaksaan, dan hakim di Pengadilan Negeri Klaten.

##### b. Data Sekunder

Sumber-sumber data yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, perundang-undangan dan putusan hakim Pengadilan Negeri Klaten mengenai kasus yang terkait.

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

##### 1) Bahan primer meliputi:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

##### 2) Bahan Sekunder

Bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer selain putusan perkara ini dapat berupa :

a) Buku-buku ilmiah.

b) Makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut :

### a. Studi Wawancara

Wawancara langsung dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh keterangan data tentang subjek dan objek yang diteliti., yaitu dengan kepolisian, kejaksaan, dan hakim Pengadilan Negeri Klaten.

### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

## 6. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen



tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.<sup>9</sup>

Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang pemidanaan terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan hakim dan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan.

---

<sup>9</sup> Lexy J Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi: Bandung: Remaja Rosda Karya. Hal. 179

## **G. Sistematika Skripsi**

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambarann singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematikan Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan pukajian pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan umum tentang tindak pidana, Tinjauan umum tentang tindak pidana kesusilaan, Tinjauan umum tentang anak dan perlindungan anak, Tinjauan umum tentang Sistem Peradilan Anak.

BAB III adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: 1) Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan; 2) Prosedur pelaksanaan peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.